



Berkas Tersangka Korupsi Perdin DPRD Rampung

DI tempat terpisah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menyatakan telah merampungkan berkas tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar, dengan tersangka I Gusti Rai Suta.

Kepala Kejari (Kajari) Denpasar Erna Normawati Widodo Putri menyatakan, berkas untuk tersangka mantan sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Denpasar itu rampung. Pekan ini akan dilakukan tahap II ke Pengadilan Tipikor Denpasar. "Kamis tanggal 20 April ini tahap II dan akan kami lakukan pelimpahan tersangka Rai Suta," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/4).

Disinggung terkait adanya tersangka lain, mantan Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Bali ini menegaskan, yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini adalah sekwan (Rai Suta, red). "Dalam kasus Perdin ini sudah jelas yang bertanggungjawab itu Sekwan," ujar Erna.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi perdin DPRD Kota Denpasar ini telah mempidanakan mantan Kabag Risalah Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Gusti Made Patra, 58. Patra dalam persidangan telah dijatuhi pidana penjara selama satu tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Selain menjatuhkan pidana badan, Patra juga divonis hukuman denda Rp 50 juta, dan subsidair satu bulan kurungan.

Patra dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

dalam dakwaan subsidair JPU. Atas perbuatannya, Patra dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mengenai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2.292.268.170 miliar. Dalam amar putusan, majelis hakim tidak membebaskan Patra membayar kerugian negara. Karena telah menyerahkan uang pengganti kepada JPU sebagai pengembalian kerugian negara. (pra/dot)

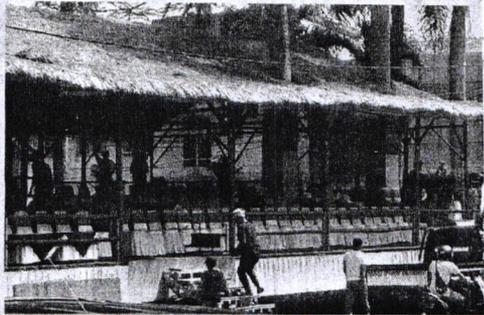
Edisi : Selasa, 18 April 2017

Hal : 27



Radar Bali

Garda Tipikor Soroti Panggung HUT Kota



• NUSABALI/EKA SR
Persiapan panggung undangan untuk menyaksikan pawai budaya serangkaian HUT Gianyar ke-246 di utara Balai Budaya Gianyar, Senin (17/4).

GIANYAR, NusaBali

Panggung di sebelah utara Balai Budaya Gianyar untuk tamu undangan menyaksikan pawai budaya serangkaian HUT Gianyar ke-246 kembali jadi sorotan. Pembuatan panggung tersebut dinilai pemborosan dan terkesan jor-joran dan tidak memikirkan jalur lalu lintas masyarakat umum.

Hal itu diungkapkan Ketua DPC Garda Tipikor Indonesia (GTI) Gianyar, Pande Mangku Rata, Senin (17/4). Ia menilai, panggung ini menandakan panitia hanya ingin pamer kemewahan kepada undangan yang juga anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Semestinya panitia menyediakan tempat yang luas bagi masyarakat yang ingin menonton. "Ini kesannya tidak memikirkan masyarakat," ungkapnya.

Mangku Rata menilai jauh lebih baik bila anggaran panggung Rp 165 juta itu digunakan untuk kegiatan sosial. Karena digunakan hanya beberapa jam.

Kata dia, jika panggung tersebut sewaan biasanya menggunakan sistem knock down sehingga pemasangannya tidak berhari-hari. "Kayaknya sistem sewa ini hanya akal-akalan saja. Apalagi bambu yang digunakan adalah bambu bekas, begitu juga dengan atapnya juga alang-alang bekas," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan kenapa tidak menggunakan open stage yang ada. "Open stage itu dibuat sesuai kajian, untuk pementasan seni," tegasnya. Hal senada diungkapkan anggota DPRD Gianyar, Ida Bagus Manu Atmaja. Pembuatan panggung

itu kurang tepat karena masyarakat tidak akan bisa melihat pentas peserta pawai budaya itu. Nantinya yang bisa menonton pentas tersebut hanya undangan saja. "Padahal masyarakat umum ingin menyaksikan pentas seni itu," ujarnya.

Menurutnya, jika memakai open stage, panitia tidak akan mengeluarkan anggaran sampai ratusan juta. Panggung itu disewa dari CV Wahyu Dewata di Kelurahan Bebalang, Bangli. Koordinator lapangan CV Wahyu Dewata, Kadek Ari saat dikonfirmasi, membenarkan panggung tersebut disewa di tempatnya dengan nilai sewa per meter persegi Rp 300.000. Luas panggung 550 meter persegi dengan nilai sewa sekitar Rp 165 juta," jelasnya. "Tinggi stager yang kami punya tidak ada yang sesuai tinggi panggung yang diinginkan, karena itu kami gunakan bambu," terangnya.

Ketua Panitia HUT ke-246 Kota Gianyar, Wayan Suardana yang juga Asisten I Setda Gianyar menjelaskan, panggung itu untuk memenuhi kapasitas tamu undangan yang akan menyaksikan pawai budaya. Sebab HUT Kota Gianyar kali ini berbarengan dengan Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (Rakernas JKPI). Mengingat berbarengan dengan Rakernas ini, sehingga yang hadir sebagai undangan menyaksikan pawai budaya nanti ada 58 anggota JKPI dan tambahan 4 calon anggota JKPI. "Akan ada 62 Bupati dari seluruh Indonesia yang hadir ikut menonton pawai budaya, makanya kebijakan bapak itu dibikinlah panggung di sebelah utara," ungkapnya. e

Edisi : _____

Hal : _____



Radar Bali

HARI PUPUTAN Pekab Klungkung Anggarkan Rp 1,5 Miliar

SEMARAPURA- Memeriahkan perayaan Hari Puputan Klungkung ke-109, HUT Kota Semarapura ke-25 dan Semarapura Festival ke III, Pemerintah Kabupaten Klungkung akan menggelar berbagai kegiatan menarik. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan acara tahunan tersebut mencapai Rp 1,5 miliar.

"Dana untuk seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Puputan Klungkung, HUT Kota Semarapura ke-25 dan Semarapura Festival tersebut kami anggarkan sebesar Rp 1.516.437.500. Semua anggaran tersebut berasal dari APBD tahun 2017," ungkap Kabag Pemerintahan Setda Klungkung, Luh Ketut Ari Citrawati saat dihubungi via telepon, Senin (17/4) kemarin.

Adapun dalam rapat pemantapan persiapan acara berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung beberapa waktu lalu. Terungkap bahwa rangkaian perayaan Hari Puputan Klungkung, HUT Kota Semarapura sudah dimulai sejak, Kamis (13/4) dan dilanjutkan dengan berbagai acara perlombaan di bidang olahraga serta seni dan budaya.

Kemudian di hari puncak, yakni di tanggal 28 April mendatang akan ditampilkan tarian masal Rejang Renteng yang nantinya akan dibawakan oleh sekitar 800an lebih penari di Catus Pata Klungkung. Selain itu, pada hari yang sama juga akan dilaksanakan pembukaan Semarapura Festival ke III yang akan dibuka oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Serta pembukaan pameran UMKM, Kuliner Khas Kabupaten Klungkung, dan bursa tenaga kerja (job fair).

Pada hari terakhir, sekaligus penutupan Festival Semarapura ke III pada 2 Mei 2017 akan ditampilkan artis penyanyi papan atas nasional, Raisa. Raisa akan tampil di panggung terbuka depan Monumen Puputan Klungkung dengan membawakan lagu-lagu andalannya yang sudah menjadi hits. (ayu/dot)

Edisi : Selasa, 18 April 2017
Hal : 6



KARTU KBS

Sanksi untuk Rekanan Dinilai Ringan

MANGUPURA- DPRD Badung mengaku kecewa dengan tidak ada sanksi tegas untuk rekanan pencetak kartu Krama Badung Sehat (KBS). Sekadar diketahui, hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat melaporkan kartu KBS yang bermasalah membengkak dari 25.642 menjadi 28.341 dengan nilai kerugian Rp 310.050.540.

Anggota Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Gede Wiradana mengatakan, rekanan diminta tidak cukup hanya mengembalikan uang. Namun pihaknya meminta pihak rekanan tetap melakukan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. "Saya minta rekanan melakukan kegiatan sesuai dengan kesepakatan, tidak cukup hanya mengembalikan uang ke kas daerah saja. Nanti rekanan lain bisa saja kalau bermasalah kembalikan saja uangnya, tanpa ada sanksi lainnya. Ini namanya tak bertanggung jawab," tegasnya, Senin (17/4).

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta masalah buruk ini tidak sampai terjadi lagi di perangkat daerah lainnya. "Program serta visi dan misi bupati itu sangat baik, namun pihak yang menjadi leading sektor harus juga melakukan pekerjaan dengan baik. Rekanan juga kita minta melakukan pekerjaan sesuai dengan standar sehingga tidak muncul lagi kasus seperti masalah karut KBS ini ke depannya," paparnya.

Hal senada juga dikatakan ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Agus Nadi Putra. Menurutnya, keputusan memang sudah diambil pemerintah tepatnya pihak Inspektorat, tapi pihaknya masih tetap merasa kecewa terhadap pengerjaan kartu KBS tersebut. "Dari awal kita rasa sudah tidak benar, kami berharap perlu adanya perbaikan lagi dalam perekrutan rekanan ke depannya. Kami sangat mendukung program Bupati badung untuk kesejahteraan masyarakatnya, tapi kembali saya katakan jangan gara-gara tidak mengikuti sistem, program bupati ini malah jelek," terangnya.

Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak terkait hal ini. "Karena pemerintah sudah memberikan sanksi seperti itu mau bagaimana lagi, kami dari dewan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini tugasnya hanya sebagai lembaga kontrol," ungkapnya. (dwi/dc x)

Edisi : Selasa, 18 April 2017
Hal : 28



Lagi, Jaksa Selidiki Korupsi Manuver

Setelah Menerima Berkas Dari Seksi Intelijen

NEGARA - Kasus dugaan korupsi Terminal Manuver Gilimanuk dilimpahkan tim dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana dilimpahkan kepada sekai pidana khusus untuk menyelidiki kembali sebelum ditingkatkan pada penyidikan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari

Jembrana I Made Pasek Budiawan mengatakan berkas terkait dugaan korupsi yang diselidiki seksi intelijen sudah diterima, pihaknya akan menelaah terlebih dulu berkas yang telah diterimanya. "Saya baru terima dari bawah (seksi intelijen)," terangnya. Budiawan menyebutkan dibawah karena seksi intelijen yang ruangnya berada di lantai satu kantor Kejari Jembrana, Senin (17/4).

Selain masih butuh waktu untuk menelaah berkas, mantan Kasipidsus

Kejari Klungkung ini menunggu petunjuk dari Kepala Kejari Jembrana Anton Delianto, apakah nantinya diberi petunjuk untuk langsung penyidikan atau perlu dilakukan penyelidikan lagi.

Namun dirinya lebih cenderung untuk melakukan penyelidikan lagi seperti yang dilakukan seksi intelijen dengan memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa. "Tapi kami tetap menunggu petunjuk pimpinan," ujarnya.

Budiawan juga belum bisa menyimpulkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan berpotensi menjadi tersangka atas dugaan korupsi tersebut, karena masih memerlukan waktu telaah berkas dan penyelidikan lebih mendalam. Segala unsur harus diperdalam di tahap penyelidikan nanti, apakah ada melawan hukum atau aturan yang dilanggar. Termasuk dugaan kerugian negara dan pihak-pihak yang diuntungkan. (bas/rid)

Edisi : Selasa, 18 April 2017

Hal : 6